

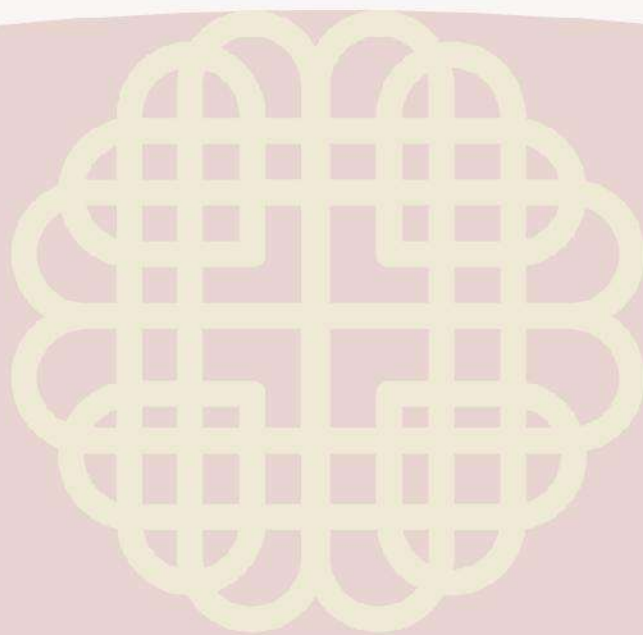


BADAN POM

LAPORAN

Keuangan

AUDITED
TAHUN 2025



BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai POM di Indragiri Hulu sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Indragiri Hulu berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai POM di Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Utama BPOM. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pematang Reba, 02 Mei 2026

Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.

NIP. 19760502 200212 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	22
B.2.1. Belanja Pegawai	24
B.2.2. Belanja Barang	25
B.2.3. Belanja Modal	25
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar	29
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	29
C.1.2. Kas Lainnya Setara Kas	29

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka(<i>Prepaid</i>)	30
C.1.4. Persediaan	30
C.2. Aset Tetap	31
C.2.1. Tanah	31
C.2.2. Peralatan dan Mesin	32
C.2.3. Gedung dan Bangunan	34
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	35
C.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	35
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	37
C.3. Aset Lainnya	
C.3.1. Aset Tak Berwujud	37
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	37
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	38
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	38
C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan	39
C.4.3. Pendapatan Diterima Dimuka	39
C.4.4. Uang Muka dari KPPN	39
C.5. Ekuitas	40
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
D.2. Beban Pegawai	41
D.3. Beban Persediaan	42
D.4. Beban Barang dan Jasa	43
D.5. Beban Pemeliharaan	43
D.6. Beban Perjalanan Dinas	44
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D.8. Kegiatan Non Operasional	45
D.9. Pos Luar Biasa	46
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47

E.1. Ekuitas Awal	47
E.2. Surplus (Defisit LO)	47
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	47
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan	47
E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	47
E.3.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	48
E.4. Transaksi Antar Entitas	48
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain/ Diterima Dari Entitas Lain	49
E.4.2. Transfer Keluar/ Transfer Masuk	49
E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung	50
E.5 Ekuitas Akhir	50
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	66
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	66
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	66
F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	66
F.2.2. Rekening Pemerintah	66
F.2.3. Pengelola Keuangan	68
F.2.4. Hasil Inventarisasi Aset	68
F.2.5. Transaksi Resiprokal	68
F.2.6. Perjanjian Sewa atas Gedung/Bangunan dan Kendaraan	69
F.2.7. Program Prioritas Nasional	69
F.2.8. Capaian Ouput Stategis	70

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai POM di Indragiri Hulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* TA 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pematang Reba, 2 Mei 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.
NIP. 19760502 200212 2 001

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Kriteria Kualitas Piutang	13
Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 4 : Perincian Perubahan DIPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	21
Tabel 5 : Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	22
Tabel 6 : Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	23
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	23
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	24
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 30 31 Desember 2025 dan 2024	25
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	26
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	26
Tabel 12 : Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	27
Tabel 13 : Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2025 dan 2024	29
Tabel 14 : Perincian Belanja Dibayar di Muka Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	30
Tabel 15 : Perincian Mutasi Persediaan Periode 31 Desember 2025	30
Tabel 16 : Perincian Persediaan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	31
Tabel 17 : Perincian Mutasi Tanah periode 31 Desember 2025	32
Tabel 18 : Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025	32
Tabel 19 : Pembelian Peralatan dan Mesin	33
Tabel 20 : Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	33
Tabel 21 : Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	34
Tabel 22 : Perincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025	34
Tabel 23 : Perincian Mutasi Jalan dan Irigasi Per 30 Desember 2025	34
Tabel 24 : Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Periode 31 Desember 2025	35

Tabel 25	: Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	35
Tabel 26	: Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2025	38
Tabel 27	: Perincian Dana yang dibatasi penggunaanya Periode 31 Desember 2025	38
Tabel 28	: Perincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025	39
Tabel 29	: Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 30	: Perincian Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel 31	: Perincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel 32	: Perincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 33	: Perincian Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 34	: Perincian Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 35	: Perincian Beban Peny. dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 36	: Perincian Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 37	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	46
Tabel 38	: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	48
Tabel 39	: Perincian Transaksi Antar Entitas	48
Tabel 40	: Perincian Atas Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	49
Tabel 41	: Perincian Atas Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	49
Tabel 42	: Perincian Atas Transfer Masuk	50
Tabel 43	: Pengelola Keuangan Balai POM di Indragiri Hulu	51
Tabel 44	: Rekening Pemerintah	52
Tabel 45	: Nomor Pokok Wajib Pajak	52
Tabel 46	: Perincian Barang Bukti Periode 31 Desember 2025	53
Tabel 47	: Prioritas Nasional	56

RINGKASAN

Laporan Keuangan BPOM di Indragiri Hulu Tahunan TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp619.397,00 atau mencapai 0,00 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp00,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.495.097.689,00 atau mencapai 22,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.883.385.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.893.040.982,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp65.868.682,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp2.500.288.201,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp326.884.099,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp26.380.348,00 dan Rp2.893.040.982,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp159.881,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp3.501.696.975,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-3.501.537.094,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.582.699,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp3.507.119.793,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.876.326.068,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.507.119.793,00 kemudian ditambah koreksi nilai aset non revaluasi yang menambah nilai ekuitas senilai Rp 823.885,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp00,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.866.660.634,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk untuk Tahunan TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2025			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	619.397,00	619.397,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	619.397,00	619.397,00	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.243.712.000,00	1.243.055.701,00	(656.299,00)	99,95
Belanja Barang	B.2.2	2.806.140.000,00	1.869.329.527,00	(936.810.473,00)	66,62
Belanja Modal	B.2.3	11.833.533.000,00	382.712.461,00	(11.450.820.539,00)	3,23
JUMLAH BELANJA		15.883.385.000,00	3.495.097.689,00	(12.388.287.311,00)	22,00

Pematang Reba, 2 Mei 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.
NIP. 19760502 200212 2 001

II. NERACA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1	0,00	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	-	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	0,00
Persediaan	C.1.4	65.868.682,00	88.044.028,00
JUMLAH ASET LANCAR		65.868.682,00	88.044.028,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1.246.580.000,00	1.246.580.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.749.830.432,00	2.367.117.971,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	-	300.503.751,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(1.496.122.231,00)	(1.121.708.223,00)
JUMLAH ASET TETAP		2.500.288.201,00	2.792.493.499,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	26.380.348,00	300.503.751,00
Aset Lain-lain	C.3.3	300.503.751,00	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		326.884.099,00	300.503.751,00
JUMLAH ASET		2.893.040.982,00	3.181.041.278,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	26.380.348,00	304.715.210,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK		26.380.348	304.715.210
JUMLAH KEWAJIBAN		26.380.348	304.715.210
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	2.866.660.634,00	2.876.326.068,00
JUMLAH EKUITAS		2.866.660.634,00	2.876.326.068,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.893.040.982,00	3.181.041.278,00

Pematang Reba, 2 Mei 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.
NIP. 19760502 200212 2 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	159.881,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		159.881,00	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.243.055.701,00	1.667.047.492,00
Beban Persediaan	D.3	102.605.901,00	100.922.663,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.082.029.192,00	1.167.198.164,00
Beban Pemeliharaan	D.5	69.320.298,00	65.893.856,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	629.447.990,00	982.476.462,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	375.237.893,00	308.771.335,00
JUMLAH BEBAN		3.501.696.975,00	4.292.309.972,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.501.537.094,00)	(4.292.309.972,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(5.582.699,00)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		459.516,00	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.042.215,00	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Operasional	D.8	(5.582.699,00)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.507.119.793,00)	(4.292.309.972,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.9	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.507.119.793)	(4.292.309.972)

Pematang Reba, 2 Mei 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.
NIP. 19760502 200212 2 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.876.326.068,00	1.713.663.239,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.507.119.793,00)	(4.292.309.972,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	823.885,00	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	823.885,00	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.496.630.474,00	5.454.972.801,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(9.665.434,00)	1.162.662.829,00
EKUITAS AKHIR	E.5	2.866.660.634,00	2.876.326.068,00

Pematang Reba, 2 Mei 2026

Kepala Balai POM di Indragiri Hulu



Yeramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.

NIP. 19760502 200212 2 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Balai
POM di
Indragiri Hulu*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

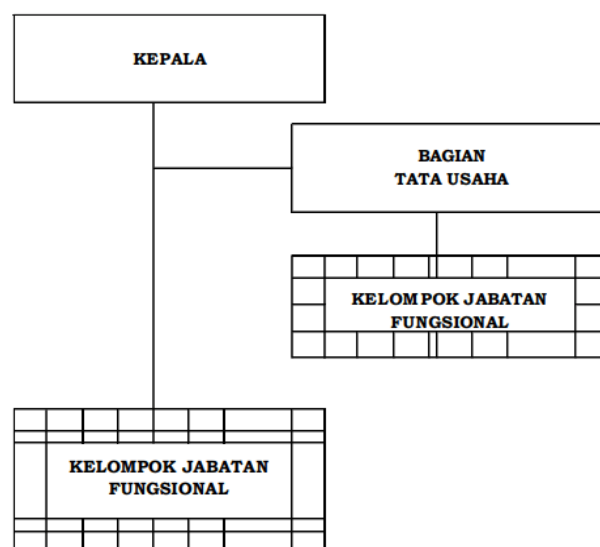
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;

- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas peyananan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan Masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu



Renstra Balai POM di Indragiri Hulu memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Balai POM di Indragiri Hulu adalah Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPOM di Indragiri Hulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

BPOM di Indragiri Hulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPOM di Indragiri Hulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari BPOM di Indragiri Hulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPOM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL
- Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

*Pendapatan -
LO*

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BBPOM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu; dan
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) **Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Kriteria
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d Tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 1. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (*leaflet*, brosur, dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, dan Hewan Percobaan;
 2. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*); dan
 3. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan buku pembanding.
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan ke masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai persediaan berupa arsip sampel di lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan

barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
- Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian;
 - b. Biaya pengangkutan;
 - c. Biaya penanganan;
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga;
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 2. Harga Pokok Produksi (HPP) digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. HPP dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:

1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 3. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan, dan masih dalam keadaan baik.
- b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

*Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Indragiri Hulu memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp15.883.385.000,00. Sampai dengan Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 15 kali dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program Automatic Adjustment dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi I DIPA tanggal 31 Desember 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran;
2. Revisi II DIPA tanggal 17 Februari 2025 dalam rangka restrukturisasi efisiensi anggaran dan penundaan Hal. III DIPA periode Triwulan I;
3. Revisi III DIPA tanggal 12 Maret 2025 dalam rangka pemenuhan anggaran belanja bahan gaji PPNPN;
4. Revisi IV DIPA tanggal 17 Maret 2025 dalam rangka penundaan KPA pemenuhan anggaran belanja pegawai;
5. Revisi V DIPA tanggal 25 Maret 2025 dalam rangka relaksasi pemanfaatan blokir anggaran;
6. Revisi VI DIPA tanggal 17 April 2025 dalam rangka penundaan KPA pemenuhan belanja pegawai;
7. Revisi VII DIPA tanggal 22 April 2025 dalam rangka penundaan Hal. III DIPA periode Triwulan II;
8. Revisi VIII DIPA tanggal 19 Mei 2025 dalam rangka penundaan KPA pemenuhan belanja pegawai;

9. Revisi IX DIPA tanggal 30 Juni 2025 dalam rangka relaksasi pemanfaatan blokir anggaran ke-2 dalam pemenuhan belanja pegawai CASN TA 2024 dan pmutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan III.
10. Revisi 10 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 09 September 2025, berupa Pergeseran Anggaran.
11. Revisi 11 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 01 Oktober 2025
12. Revisi 13 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 17 Oktober 2025, berupa Pergeseran Anggaran;
13. Revisi 14 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 05 November 2025, berupa Relaksasi Buka Blokir;
14. Revisi 15 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 14 November 2025, berupa Pmutakhiran KPA;
15. Revisi 16 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 12 Desember 2025, berupa Pmutakhiran KPA;

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Jasa	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	899.363.000,00	1.243.712.000,00	344.349.000,00
2.	Belanja Barang	2.723.694.000,00	2.806.140.000,00	82.446.000,00
3.	Belanja Modal	11.839.543.000,00	11.833.533.000,00	-6.010.000,00
Jumlah Belanja		15.462.600.000,00	15.883.385.000,00	420.785.000,00

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar RP 344.349.000 karena

penambahan Pegawai CPNS dan PPPK pada bulan Juni 2025.

2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp 82.446.000 karena adanya buka blokir anggaran.
3. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 6.010.000 karena

Realisasi Pendapatan Rp619.397,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp619.397,00. Yaitu

1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 159.881,00 Terinci dalam tabel berikut :

Tabel 5
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.Dokumen	Tanggal	Nilai	Ket
7B6563CIFU0KIK7	27/10/25	4.054,00	Denda Pengadaan Belanja Meubell
8DE2D3CIFU0KIJ6R	27/10/25	4.171,00	Denda Pengadaan Belanja Meubell
8A6396U8F8A8B5B5	28/10/25	4.171,00	Denda Pengadaan Belanja Meubell
BCB021JNG8UE3RO9	11/11/25	144.685,00	Denda Pengadaan Belanja Meubell
60B3D48VVOO9ROJA	01/12/25	2.800,00	Denda Pengadaan Alat Rumah Tar
Jumlah		159.881,00	

dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 459.516,00 berupa pengembalian tunjangan kinerja an. Rio Riduan

Realisasi Belanja Rp3.495.097.689,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.495.097.689,00 atau 22% dari anggaran belanja sebesar Rp15.883.385.000,00 Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp 12.372.171.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 99,54%. Perincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.243.712.000,00	1.243.055.701,00	99,95
Belanja Barang	2.806.140.000,00	1.869.329.527,00	66,62
Belanja Modal	11.833.533.000,00	382.712.461,00	3,23
Total Belanja Kotor	15.883.385.000,00	3.495.097.689,00	22,00
Pengembalian	0,00	-	-
Jumlah	15.883.385.000,00	3.495.097.689,00	22,00

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp1.957.038.733,00 atau 35,89% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan belanja secara umum dikarenakan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan satuan kerja pusat yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama sesuai Surat Edaran Kepala Biro SDM Nomor B-KU.02.03.24.330 Tanggal 22 Mei 2024. Selain itu juga disebabkan oleh adanya efesiensi anggaran untuk belanja barang dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Pegawai	1.243.055.701,00	1.667.047.492,00	(25,43)
Belanja Barang	1.869.329.527,00	2.331.432.861,00	(19,82)
Belanja Modal	382.712.461,00	1.453.656.069,00	(73,67)
Jumlah	3.495.097.689,00	5.452.136.422,00	(35,89)

*Belanja Pegawai**Rp1.243.055.701,00****B.2.1 Belanja Pegawai***

Realisasi Belanja Pegawai Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.243.055.701,00 dan Rp1.667.047.492,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp423.991.791,00 atau 25,43% bila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BPOM yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama. Perincian belanja pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	30 Desember 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.079.093.905,00	724.457.777,00	48,95
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	149.500.216,00	97.010.837,00	54,11
Belanja Lembur	14.832.000,00	8.103.500,00	83,03
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	837.475.580,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.243.426.121,00	1.667.047.694,00	(25,41)
Pengembalian Belanja Pegawai	370.420,00	202,00	(183.276,24)
Jumlah Belanja	1.243.055.701,00	1.667.047.492,00	25,43

Perincian Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp370.420,00 merupakan pengembalian perubahan jabatan fungsional umum menjadi struktural dan potongan lain – lain.

*Belanja Barang**Rp1.869.329.527,00***B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.869.329.527,00 dan Rp2.333.961.045,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp464.631.518,00 atau 19,91% dari 2024 disebabkan Karena kebijakan efisiensi anggaran. Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	207.981.030,00	255.004.057,00	(18,44)
Belanja Barang Non Operasional	181.511.863,00	190.078.679,00	(4,51)
Belanja Barang Persediaan	85.621.168,00	139.334.005,00	(38,55)
Belanja Jasa	696.747.758,00	721.560.571,00	(3,44)
Belanja Pemeliharaan	68.019.718,00	42.979.087,00	58,26
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	629.447.990,00	985.004.646,00	(36,10)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	1.869.329.527,00	2.333.961.045,00	(19,91)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	100,00
Belanja Netto	1.869.329.527,00	2.333.961.045,00	(19,91)

Perincian Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp0,00.

*Belanja Modal**Rp382.712.461,00***B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp382.712.461,00 dan Rp1.153.152.318,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp770.439.857,00 atau 66,81%, disebabkan Karena kebijakan efisiensi anggaran. Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 10.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 Desember 2025	30 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(66,81)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(66,81)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(66,81)

*Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp382.712.461,00*

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Balai di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp382.712.461,00 dan Rp1.153.152.318,00. Belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp770.439.857,00 atau 66,81% bila dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir 31 September 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*). Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(67)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00		#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(67)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	382.712.461,00	1.153.152.318,00	(67)

Penjelasan atas belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 382.712.461,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 12.
Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		71	382.712,461
3.01.01.11.003	Mesin Penghancur Es	Unit	2	7.992,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	9.879,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	1	1.900,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	2	6.345,480
3.05.01.04.015	Locker	Buah	2	8.821,440
3.05.01.04.024	Laci Box	Buah	10	28.649,995
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	2	4.623,150
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	26.917,500
3.05.01.05.095	Waslatel Portable	unit	3	4.284,600
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	9	24.345,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	9	29.349,801
3.05.02.01.005	Sica	Buah	1	14.999,999
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	1	7.992,000
3.05.02.01.033	Sofa	set	1	3.099,000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2	5.999,998
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1.940,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	1	4.749,999
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	13.000,000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	1	3.500,000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	Buah	1	1.399,999
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	2.386,500
3.05.02.07.002	Dehumidifier	Buah	3	15.760,000
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	Buah	1	4.440,000
3.07.01.21.049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	1.500,000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	7	101.500,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	9.548,000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	28.800,000
3.15.03.02.005	Tenda	Buah	1	8.991,000

- b. Belanja Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp00,00.

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Balai POM di Indragiri untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00.
- b. Belanja Penambahan Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0,00

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perincian atas Belanja Modal Lainnya sebesar Rp0,00

a. Belanja Modal Penambahan Nilai Aset lainnya sebesar Rp0,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp65.868.682,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 65.868.682,00 dan Rp 88.044.028,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13.

Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Uang Tunai di Brankas	0,00	0,00
2	Uang di Rekening Bank (UP)	0,00	0,00
3	Kwitansi UP belum di SPJ - kan	0,00	0,00
4	Uang Muka	0,00	0,00
5	Pembulatan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas dan Setara Kas Lainnya

Saldo Kas dan setara kas lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Dibayar di Muka C.1.3. Belanja Dibayar di Muka

Muka

Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode 31 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp00,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran TA berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 14.

Perincian Belanja Dibayar di Muka

Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Kontrak		Masa Kontrak		Nilai Kontrak	Nilai Belanja Dibayar Di Muka
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		
1	Sewa Kendaraan						
2	Sewa Gedung Kantor						
Jumlah						0	0

Persediaan Rp

Rp65.868.682,00

C.1.4. Persediaan

Nilai Persediaan periode 31 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp65.868.682,00 dan Rp88.044.028,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Perincian Mutasi Persediaan

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	88.044.028,00
Mutasi tambah :	90.163.350,00
Mutasi Kurang :	(111.804.834,00)
Saldo per 31 Desember 2025	65.868.682,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 16

Perincian Persediaan

Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Barang Konsumsi	55.069.466,00	64.510.148,00
2	Barang Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
3	Suku Cadang	8.481.250,00	7.710.830,00
4	Bahan Baku	2.317.966,00	15.823.050,00
Jumlah		65.868.682,00	88.044.028,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebanyak 137 unit sebesar Rp 6.042.215,00 (enam juta empat puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak dengan nilai Rp0,00 (Nol rupiah) dan kondisi usang dengan nilai 6.042.215,00 (enam juta empat puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah). Pada Satuan Kerja Balai POM di Indragiri Hulu, telah dilakukan stock opname Tahunan 2025 sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.22B.12.25.15 tanggal 25 Desember 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan persediaan sesuai Surat SK Penghapusan Berupa Barang Milik Negara Persediaan using dan rusak Nomor HK.02.02.22B.10.25.64 tanggal 26 September 2025 senilai Rp6.042.215,00

Aset Tetap

Rp2.800.791.952,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.800.791.952,00 dan Rp2.792.493.499,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai POM di Indragiri Hulu berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp1.246.580.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp1.246.580.000,00 dan Rp1.246.580.000,00 Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17.

Perincian Mutasi Tanah

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.246.580.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.246.580.000,00

Adapun Rincian Tanah pada Satuan Kerja Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Kode BMN	Nama Barang	Lokasi	Luas (m2)	Nilai	Keterangan
1	Balai POM di Indragiri Hulu	2.01.0.04.001.1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Madukara No. 5 Kramat Jati	5.862	1.246.580.000	Sertifikat Hak Pakai No.00149
			Total		5.862	1.246.580.000	

Peralatan dan

Mesin,

Rp2.749.830.432,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.749.830.432,00 dan Rp2.367.117.971,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18.

Perincian Mutasi Peralatan Dan Mesin

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.367.117.971,00
Mutasi tambah :	393.444.161,00
Pembelian	382.712.461,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	10.721.700,00
Koreksi Susulan	10.000,00
Mutasi Kurang :	(10.731.700,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.731.700,00)
Reklasifikasi Keluar	0,00
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	2.749.830.432,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2025	(71.949.440.934,00)

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp393.444.161,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pembelian sebesar Rp382.712.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 19.

Pembelian Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
3.01.01.11.003	Mesin Penghancur Es	2	7992000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2	9879000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	1900000
3.05.01.04.003	Rak Besi	2	6345480
3.05.01.04.015	Locker	2	8821440
3.05.01.04.024	Laci Box	10	28649995
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	2	4623150
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	26917500
3.05.01.05.095	Wastafel Portable	3	4284600
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	24345000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	9	29349801
3.05.02.01.005	Sice	1	14999999
3.05.02.01.022	Partisi	1	7992000
3.05.02.01.033	Sofa	1	3099000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2	5999998
3.05.02.04.001	Lemari Es	1	1940000
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	4749999
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	13000000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	1	3500000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	1	1399999
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	2386500
3.05.02.07.002	Dehumidifier	3	15760000
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	4440000
3.07.01.21.049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	1	1500000
3.10.01.02.002	Lap Top	7	101500000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9546000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	28800000
3.15.03.02.005	Tenda	1	8991000
Total		71	382.712.461,00

2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp10.721.700,00 terdapat pada Satuan Kerja Balai POM di Indragiri Hulu merupakan koreksi pencatatan atas CCTV berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.22B.07.25.38 tanggal 16 Juli 2025 dan Koreksi susulan dengan nomor PL.03.01.22B.01.26.05 tanggal 13 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20.

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Koreksi		Ket
				Pencatatan	Nilai Bertambah	
1	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	-	10.721.700	Koreksi Nilai Bertambah (Surat Koreksi Pencatatan No. PL.03.01.22B.07.25.38 Tgl 16 Juli 2025
2	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	-	10.000	Koreksi Nilai Bertambah (Surat Koreksi Pencatatan No. PL.03.01.22B.01.26.05 Tgl 13 Januari 2026

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.731.700 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp10.731.700,00 berupa transaksi penggabungan aset berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PL.03.01.22B.07.25.38 tanggal 16 Juli 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 21

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	7	-7998750
3.06.01.01.092	Analog/Digital Receiver	1	-2732950
Total		8	- 10.731.700,00

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 22.

Perincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

Penjelasan tabel mutasi dan perinciannya

Jalan dan Irigasi
Rp0,00

C.2.4. Jalan dan Irigasi

Saldo Jalan dan Irigasi periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan dan Irigasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23.

Perincian Mutasi Jalan dan Irigasi Per 30 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Jalan dan Jembatan	
Saldo awal 31 Desember 2024	0,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo akhir 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00
Irigasi	
Saldo awal 31 Desember 2025	0,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo akhir 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00
Jumlah Total Jalan dan Irigasi	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan tabel mutasi dan perinciannya

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24.

Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

Tidak terdapat mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan.

KDP

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 300.503.751,00 dan Rp300.503.751,00 . Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		300.503.751,00
Mutasi tambah		0,00
Pengembangan KDP	-	
Koreksi Nilai KDP Bertambah	-	
Perolehan/Penambahan KDP	-	
Mutasi Kurang		-
Pengembangan Melalui KDP	-	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	-	
Koreksi Pencatatan KDP	-	
Saldo Per 31 Desember 2025		300.503.751,00

Penjelasan Perincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp300.503.751,00 adalah sebagai berikut:

- Saldo akhir per 31 September 2025 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp 300.503.751,00 dan satker Balai BPOM di Indragiri Hulu telah melakukan stock opname KDP dengan perincian sebagai berikut:

No	BA SO KDP		Nilai	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1	PL.03.01.22B.01.26.04	15 Januari 2026	300.503.751	Realisasi KDP berupa Transportasi, Konsumsi, dan pekerjaan perencanaan (80%).
TOTAL			300.503.751	

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Akumulasi Peny.

Aset Tetap

Rp1.496.122.231,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.496.122.231,00 dan Rp1.121.708.223,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 26.

Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.749.830.432,00	(1.496.122.231,00)	1.253.708.201,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Jalan dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		2.749.830.432,00	(1.496.122.231,00)	1.253.708.201,00

Aset Lainnya

Rp0,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp26.380.348,00 dan Rp 300.503.751 ,00.

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset lainnya pada Balai POM di Indragiri Hulu merupakan Dana yang dibatasi penggunaannya yang merupakan Rekening Penampungan Akhir TA (RPATA).

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetap secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Dana Yang

Dibatasi

Penggunaannya

Rp26.380.348,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp26.380.348,00 dan Rp 300.503.751 ,00. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan/diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Adapun Perincian Dana Yang Dibatasi Penggunaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Perincian Dana yang dibatasi penggunaannya
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Penyedia	Uraian Jenis Pekerjaan	Kontrak			SPM		SP2D		Nilai
			Nomor dan tanggal	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	TRANSKLIN INDONESIA MANDIRI	Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Pengemudi, Kebersihan Kantor dan Tenaga Front Office	PL.02.01.7C.01.25.014	02/01/2025	31/12/2025	00003A	07/01/2026	26092000000144	07/01/2026	Rp 14.887.351,00
2	PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	PENGADAAN JASA SATPAM	PL.02.01.7C.01.25.015	02/01/2025	31/12/2025	00004A	07/01/2026	26092000000143	07/01/2026	Rp 11.205.429,00

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp0,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Utang Kepada

Pihak Ketiga

Rp26.380.348,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp26.380.348,00 dan Rp 300.503.751 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun perincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 28

*Perincian Utang kepada Pihak Ketiga**Per 31 Desember 2025**(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1	Utang kepada Pihak Ketiga	26.380.348,00
Total		26.380.348,00

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp26.380.348,00 adalah sebagai berikut:

1. Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp Rp26.380.348,00 merupakan pembayaran RPATA kepada outsourcing yang di bayarkan pada januari 2026.

Utang Yang Belum Ditagihkan C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Utang Yang Belum Ditagihkan C.4.3 Pendapatan diterima di muka

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Uang Muka dari KPPN C.4.4. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp0,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai Bendahara Pengeluaran pada saat pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ekuitas

Rp 3.057.525.259,

C.5. Ekuitas

Ekuitas untuk Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.057.525.259,00 dan Rp 2.876.326.068,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp159.881,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp159.881,00 dan Rp0,00. Pendapatan terdiri dari:

Tabel 29.

Perincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	159.881,00	0,00	-
Jumlah	159.881,00	0,00	-

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak.

1. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan berupa sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia yaitu belanja modal.

Tidak terdapat selisih akun Pendapatan pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Beban Pegawai

Rp1.243.055.701,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.243.055.701,00 dan Rp 1.667.047.492,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perincian Beban pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 30.

Perincian Beban Pegawai

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Gaji Pokok PNS	753.627.800,00	527.430.300,00	42,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.038,00	6.773,00	136,79
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	42.145.832,00	36.987.600,00	13,95
Beban Tunj. Anak PNS	9.220.730,00	8.078.138,00	14,14
Beban Tunj. Struktural PNS	12.420.000,00	7.560.000,00	64,29
Beban Tunj. Fungsional PNS	51.990.000,00	45.990.000,00	13,05
Beban Tunj. PPh PNS	2.697.565,00	2.721.766,00	(0,89)
Beban Tunj. Beras PNS	40.337.940,00	29.692.200,00	35,85
Beban Uang Makan PNS	146.173.000,00	63.401.000,00	130,55
Beban Tunjangan Umum PNS	20.465.000,00	2.590.000,00	690,15
Beban Gaji Pokok PPPK	107.478.800,00	75.262.800,00	42,80
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.468,00	1.537,00	(4,49)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.465.280,00	0,00	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	897.008,00	0,00	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.450.000,00	8.475.000,00	11,50
Beban Tunjangan Beras PPPK	5.286.660,00	1.810.500,00	192,00
Beban Uang Makan PPPK	17.626.000,00	11.461.000,00	53,79
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.295.000,00		
Beban Uang Lembur	14.832.000,00	8.103.500,00	83,03
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	0,00	744.810.982,00	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	0,00	92.664.598,00	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(420,00)		
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(370.000,00)		-
Jumlah	1.243.055.701,00	1.667.047.694,00	(25,43)

Selisih Beban Belanja Pegawai yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat pengembalian tunjangan struktural yang otomatis terpotong dari sistem.

Beban Persediaan

Rp102.605.901,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.605.901,00 dan Rp100.922.663,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 31.

Perincian Beban Persediaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Persediaan Konsumsi	72.552.879,00	59.755.079,00	21,42
Beban Persediaan Bahan Baku	30.053.022,00	41.167.584,00	(27,00)
Jumlah	102.605.901,00	100.922.663,00	1,67

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

Beban Barang dan Jasa **D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jasa

Rp1.082.029.192,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.082.029.192,00 dan Rp 1.167.198.164,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 32.

Perincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Barang Operasional	207.353.880,00	254.972.420,00	(18,68)
Beban Barang non Operasional	177.605.995,00	185.125.679,00	(4,06)
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	3.905.868,00	4.953.000,00	(21,14)
Beban Langganan Listrik	47.565.661,00	58.533.594,00	(18,74)
Beban Langganan Telepon			#DIV/0!
Beban Sewa	281.810.000,00	283.236.200,00	(0,50)
Beban Jasa Profesi	9.500.000,00	21.450.000,00	(55,71)
Beban Jasa Lainnya	354.287.788,00	358.927.271,00	(1,29)
Jumlah	1.082.029.192,00	1.167.198.164,00	(7,30)

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar dan BAST/Spby/SPP belanja barang dan jasa yang belum terbit SP2D.

Beban

Pemeliharaan

Rp69.320.298,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.320.298,00 dan Rp65.893.856,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 33.

Perincian Beban Pemeliharaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.247.718,00	42.979.087,00	44,83
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	5.772.000,00	1.889.000,00	205,56
Beban Persediaan Suku Cadang	1.300.580,00	21.025.769,00	(93,81)
Jumlah	69.320.298,00	65.893.856,00	5,20

Selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat perbedaan pengelompokan sebagian akun beban persediaan yang masuk kategori beban pemeliharaan.

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp 629.447.990,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 629.447.990,00 dan Rp982.476.462,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 34.

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	483.023.806,00	551.608.673,00	(12,43)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	97.550.600,00	82.345.000,00	18,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.340.000,00	48.974.000,00	(87,05)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.533.584,00	299.548.789,00	(85,80)
Jumlah	629.447.990,00	982.476.462,00	(35,93)

Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat BAST/Spby/SPP Belanja Perjalanan Dinas yang belum terbit SP2D.

Beban Peny. dan

Amortisasi

Rp375.237.893,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp375.237.893,00 dan Rp308.771.335,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 35.

Perincian Beban Peny. dan Amortisasi

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	375.237.893,00	308.771.335,00	21,53
Jumlah	375.237.893,00	308.771.335,00	21,53

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional
Rp5.582.699,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36.

Perincian Kegiatan Non Operasional

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	459.516,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	459.516,00	0,00	100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lain			
Beban persediaan rusak/usang	6.042.215,00	0,00	100,00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.042.215,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.582.699,00)	0,00	100,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.582.699,00)	0,00	100,00

Penjelasan dari Transaksi Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp459.516,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kembali belanja pegawai TA yang lalu sebesar Rp459.516,00 adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 37.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

No	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai	Keterangan
1	83733QLV24PBPJ2	26-Feb-25	459.516,00	Pengembalian Belanja Pegawai TA 2024 berupa berupa Tunkin PPPK Maret dan April 2024 an Rio Riduan
Jumlah			459.516,00	

2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Beban Persediaan Rusak/Usang yang sudah dimusnahkan sebesar Rp6.042.215,00 sesuai SK Nomor HK.02.02.22B.10.25.64 tanggal 26 September 2025.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>Ekuitas Awal</i> <i>RpRp2.876.326.068,00</i>	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.876.326.068,00 dan Rp1.713.663.239,00
<i>Surplus/Defisit LO</i> <i>(Rp3.507.119.793,00)</i>	E.2. Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp3.507.119.793,00) dan (Rp4.292.309.972,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp823.885,00
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi yang diakibatkan karena kesalahan dalam perekaman nilai dan kuantitas barang pada Modul Komitmen. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Koreksi atas Reklasifikasi</i> <i>(Rp0,00)</i>	E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp0,00	Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.																								
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp823.885,00)	E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp823.885,00) dan (Rp0,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset. Koreksi tersebut terjadi karena adanya antara lain: Tabel 38. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi <table><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td>1</td><td>Koreksi Pencatatan atas CCTV dan Receiver berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.22B.07.25.38 tanggal 16 Juli 2025</td><td>(823.885,00)</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>(823.885,00)</td></tr></table>	NO	URAIAN	NILAI	1	Koreksi Pencatatan atas CCTV dan Receiver berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.22B.07.25.38 tanggal 16 Juli 2025	(823.885,00)	JUMLAH		(823.885,00)															
NO	URAIAN	NILAI																							
1	Koreksi Pencatatan atas CCTV dan Receiver berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.22B.07.25.38 tanggal 16 Juli 2025	(823.885,00)																							
JUMLAH		(823.885,00)																							
Transaksi Antar Entitas Rp3.496.630.474,00	E.4. Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.496.630.474,00 dan Rp5.454.972.801,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Tabel 39. Perincian Transaksi Antar Entitas (Dalam Rupiah) <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>31-Dec-25</th><th>31-Dec-24</th></tr><tr><td>1</td><td>Ditagihkan ke Entitas Lain</td><td>3.495.097.689,00</td><td>5.452.136.422,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Dterima dari Entitas Lain</td><td>(619.397,00)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Transfer Keluar</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Transfer Masuk</td><td>2.152.182,00</td><td>2.836.379,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>3.496.630.474,00</td><td>5.454.972.801,00</td></tr></table>	No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	1	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.495.097.689,00	5.452.136.422,00	2	Dterima dari Entitas Lain	(619.397,00)	0,00	3	Transfer Keluar	0,00	0,00	4	Transfer Masuk	2.152.182,00	2.836.379,00	Jumlah		3.496.630.474,00	5.454.972.801,00
No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24																						
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.495.097.689,00	5.452.136.422,00																						
2	Dterima dari Entitas Lain	(619.397,00)	0,00																						
3	Transfer Keluar	0,00	0,00																						
4	Transfer Masuk	2.152.182,00	2.836.379,00																						
Jumlah		3.496.630.474,00	5.454.972.801,00																						

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 3.495.097.689,00. Peperincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode 31 Desember 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 40.

Perincian Atas Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

(Dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.243.712.000,00	1.243.055.701,00	99,95
Belanja Barang	2.806.140.000,00	1.869.329.527,00	66,62
Belanja Modal	11.833.533.000,00	382.712.461,00	3,23
Jumlah	15.883.385.000,00	3.495.097.689,00	22,00

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan. Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp 619.397,00). Perincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 41.

Perincian Atas Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

(Dalam Rupiah)

Uraian	30-Sep-25		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	619.397,00	-
Jumlah	0,00	619.397,00	-

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.152.182,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar 0,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 42.

Perincian Atas Transfer Masuk

(Dalam Rupiah)

No	Satker Pengirim	Uraian	Nilai	Kuantitas	Nomor BAST	Tanggal
1	P3OMN	Baku Pembanding	601.685	6	PP.03.02.10.05.25.170A	06-May-25
2	P3OMN	Baku Pembanding	1.517.400	6	PP.03.02.10.06.25.223	18-Jun-25
3	P3OMN	Baku Pembanding	33.097	1	PP.03.02.10.10.25.411	03-Oct-25
Total			2.152.182	13		

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp00,00. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung BPOM dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh BABUN.

Ekuitas Akhir
Rp 2.866.660.634,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2.866.660.634,00 dan Rp 2.876.326.068,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tindak Lanjut Temuan BPK	E. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca F.1.1. Tindak Lanjut Temuan BPK Tidak terdapat temuan BPK pada TA 2025																								
Pengelola Keuangan	F.2. Pengungkapan Lain-lain F.2.1. Pengelola Keuangan Balai POM di Indragiri Hulu Pada saat laporan ini dibuat, Kuasa Pengguna Anggaran BPOM di Indragiri Hulu adalah Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. Dasar penetapan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.06.01.1.03.25.1308 tanggal 19 Maret 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H sebagai Kepala Balai POM di Indragiri Hulu dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 206 TAHUN 2025 tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu. Pada Tahun 2025 Pejabat Pengelola Keuangan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.02.22B.04.25.23 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pada Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Indragiri Hulu TA 2025, Perincian pejabat pengelola keuangan TA 2025 sebagai berikut: Tabel 43 Pengelola Keuangan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025 <table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Nama</th><th>No. SK dan Periode</th></tr><tr><td>1</td><td>Kuasa Pengguna Anggaran</td><td>Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc</td><td>HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024</td></tr><tr><td>2</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen I</td><td>Elsha Nadya Putri, S.K.M</td><td>HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024</td></tr><tr><td>3</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen II</td><td>Suci Pusfa Sari, S.T.P</td><td>HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024</td></tr><tr><td>4</td><td>Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar</td><td>Rama Fadli, S.T</td><td>HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024</td></tr><tr><td>5</td><td>Bendahara Pengeluaran</td><td>Debora Janet Sibarani, S.E</td><td>HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024</td></tr></table>	No	Keterangan	Nama	No. SK dan Periode	1	Kuasa Pengguna Anggaran	Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024	2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Elsha Nadya Putri, S.K.M	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024	3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Suci Pusfa Sari, S.T.P	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024	4	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Rama Fadli, S.T	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024	5	Bendahara Pengeluaran	Debora Janet Sibarani, S.E	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024
No	Keterangan	Nama	No. SK dan Periode																						
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024																						
2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Elsha Nadya Putri, S.K.M	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024																						
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Suci Pusfa Sari, S.T.P	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024																						
4	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Rama Fadli, S.T	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024																						
5	Bendahara Pengeluaran	Debora Janet Sibarani, S.E	HK.02.02.22B.04.25.23 30 Desember 2024																						

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Kemudian terjadi perubahan Pejabat Pengelola Keuangan dengan nomor HK.02.02.22B.07.25.51 tanggal 24 Juli 2025 menjadi :																								
	<table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Nama</th><th>No. SK dan Periode</th></tr><tr><td>1</td><td>Kuasa Pengguna Anggaran</td><td>Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.</td><td>HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025</td></tr><tr><td>2</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen I</td><td>Elsha Nadya Putri, S.K.M</td><td>HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen II</td><td>Suci Pusfa Sari, S.T.P</td><td>HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar</td><td>Debora Janet Sibarani, S.E</td><td>HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>Bendahara Pengeluaran</td><td>Pratiwi, A.Md</td><td>HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025</td></tr></table>	No	Keterangan	Nama	No. SK dan Periode	1	Kuasa Pengguna Anggaran	Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025	2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Elsha Nadya Putri, S.K.M	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025	3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Suci Pusfa Sari, S.T.P	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025	4	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Debora Janet Sibarani, S.E	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025	5	Bendahara Pengeluaran	Pratiwi, A.Md	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025
	No	Keterangan	Nama	No. SK dan Periode																					
	1	Kuasa Pengguna Anggaran	Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025																					
	2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Elsha Nadya Putri, S.K.M	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025																					
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Suci Pusfa Sari, S.T.P	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025																						
4	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Debora Janet Sibarani, S.E	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025																						
5	Bendahara Pengeluaran	Pratiwi, A.Md	HK.02.02.22B.07.25.51 24 Juli 2025																						
Rekening Pemerintah	F.2.2. Rekening Pemerintah Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu yaitu: Tabel 44. Rekening Pemerintah <table><tr><th>Rekening Pemerintah</th></tr><tr><td>9890316904841000 BPG 092 LOKA POM KAB INDRAGIRI HULU</td></tr></table>	Rekening Pemerintah	9890316904841000 BPG 092 LOKA POM KAB INDRAGIRI HULU																						
Rekening Pemerintah																									
9890316904841000 BPG 092 LOKA POM KAB INDRAGIRI HULU																									
Nomor Pokok Wajib Pajak	F.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan dalam kegiatan operasional satker 690484 yaitu : Tabel 45 Nomor Pokok Wajib Pajak <table><tr><th>NPWP</th></tr><tr><td>534.947.734.213.000</td></tr><tr><td>LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</td></tr></table>	NPWP	534.947.734.213.000	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR																					
NPWP																									
534.947.734.213.000																									
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR																									
Barang Bukti	F.2.4. Barang Bukti Dalam melaksanakan fungsinya, Balai POM di Indragiri Hulu melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu																								

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di Balai POM Indragiri Hulu pada 31 Desember 2025 sebagai berikut: Tabel 46 <i>Perincian Barang Bukti</i> <i>Periode 31 Desember 2025</i> <table><tr><th>Tahap Perkara</th><th>Obat (unit)</th><th>OT (unit)</th><th>Suplemen Kesehatan (unit)</th><th>Pangan (unit)</th><th>Kemasan (unit)</th><th>Kosmetik (unit)</th><th>Mesin / Alat Produksi (unit)</th><th>Uang</th><th>Lain - Lain (unit)</th></tr><tr><td>Proses SPDP/ SPDP</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tahap 1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P-18/ P-19</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P-21</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tahap 2</td><td>13.872</td><td>26.585</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SP3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>13.872</td><td>26.585</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr></table> Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 0	Tahap Perkara	Obat (unit)	OT (unit)	Suplemen Kesehatan (unit)	Pangan (unit)	Kemasan (unit)	Kosmetik (unit)	Mesin / Alat Produksi (unit)	Uang	Lain - Lain (unit)	Proses SPDP/ SPDP	-	-	-	-	-	-	-			Tahap 1	-	-	-	-	-	-	-			P-18/ P-19	-	-	-	-	-	-	-			P-21	-	-	-	-	-	-	-			Tahap 2	13.872	26.585	-	-	-	-	-			SP3	-	-	-	-	-	-	-		-	Total	13.872	26.585	-	-	-	-	-		-
Tahap Perkara	Obat (unit)	OT (unit)	Suplemen Kesehatan (unit)	Pangan (unit)	Kemasan (unit)	Kosmetik (unit)	Mesin / Alat Produksi (unit)	Uang	Lain - Lain (unit)																																																																								
Proses SPDP/ SPDP	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Tahap 1	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
P-18/ P-19	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
P-21	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Tahap 2	13.872	26.585	-	-	-	-	-																																																																										
SP3	-	-	-	-	-	-	-		-																																																																								
Total	13.872	26.585	-	-	-	-	-		-																																																																								
<i>Penerimaan Hibah Luar Negeri</i>	F.2.6. Penerimaan Hibah Luar Negeri Satker Balai POM di Indragiri Hulu tidak menerima Hibah Luar Negeri Berupa uang maupun barang.																																																																																
<i>Pinjam Pakai Gedung Kantor dan Kendaraan</i>	F.2.7. Pinjam Pakai Gedung kantor dan Kendaraan Satker Balai POM di Indragiri Hulu saat ini tidak memiliki status pinjam pakai atas tanah maupun gedung kantor dengan Pemerintah Daerah Indragiri																																																																																

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Hulu. Seluruh kegiatan operasional kantor yang berlokasi di Indragiri Hulu dilakukan di atas lahan dan bangunan dengan status penguasaan Sewa
<i>Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional</i>	F.2.8. Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan operasional Selama periode Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, terdapat sewa aset berupa gedung bangunan dan kendaraan untuk mendukung Operasional Perkantoran pada satker Balai POM di Indragiri Hulu berupa sewa Gedung bangunan dengan perjanjian sewa Nomor PL.02.02.7C.01.25.005 tanggal 01 Januari 2025 dengan masa Sewa mulai 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan nilai sewa RP 142.376.000,00.
	F.2.9. Kesalahan Penggunaan Akun 1. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB Tidak Terdapat Ketidaksesuaian antara kode akun dengan Kode Barang Aset pada Balai POM di Indragiri Hulu. 2. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan Tidak Terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode Barang Persediaan Pada Balai POM di Indragiri Hulu. 3. Pagu Minus Tidak Terdapat To Do List Pagu Minus (Basis SP2D). 4. Pengembalian Belanja melebihi Realisasi belanja Tidak Terdapat pengembalian belanja melebihi realisasi belanja pada Balai POM di Indragiri Hulu. 5. Saldo Akun Tidak normal Tidak Terdapat Saldo tidak Normal Pada Balai POM di Indragiri Hulu. 6. Kesalahan Penyajian Akun

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Sehubungan dengan pemutakhiran Bagan Akun Standar melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara yang semula pembayaran sewa rumah dinas/Negara menggunakan kodefikasi segmen akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) berubah menjadi 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi) Tidak Terdapat Kesalahan Akun Pada Pembayaran Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara Balai POM di Indragiri Hulu.
	F.2.10. Hasil inventarisasi Aset Tidak terdapat hasil inventarisasi Aset yang tidak ditemukan pada Balai POM di Indragiri Hulu.
	F.2.11. Transaksi Resiprokal Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Transaksi resiprokal di BPOM berupa saker <i>intraco</i>, nilai rupiah, skema pembayaran (uang persediaan/pembayaran langsung)/ skema penyetoran (Setor ke kas negara/potong SPM), serta penjelasan umum atas pekerjaan. Buat tabel seperti resiprokal di monsakti

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Program

Prioritas

Nasional Tahun

2025

F.2.12. Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai POM di Indragiri Hulu terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi; dan Prioritas Nasional IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

a) PN-02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas/ kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp510.000,00 dan realisasi sebesar Rp510.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : (063) BPOM

Unit Organisasi : (01) BPOM

Satuan Kerja : Balai POM di Indragiri Hulu

Tabel 47.

Prioritas Nasional II

Program / Kegiatan Prioritas	Belanja			Output			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	510.000	510.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00

b) PN-03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas/ kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp12.948.000 ,00 dan realisasi sebesar Rp 12.947.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : (063) BPOM

Unit Organisasi : (01) BPOM

Satuan Kerja : Balai POM di Indragiri Hulu

Tabel 48

Prioritas Nasional III

Program / Kegiatan Prioritas	Belanja			Output			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	12.948.000	12.947.300	99,99	3	3	UMKM	100,00

c) PN-04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 9 program prioritas/ kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp679.771.000,00 dan realisasi sebesar Rp664.455.104,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : (063) BPOM

Unit Organisasi : (01) BPOM

Satuan Kerja : Balai POM di Indragiri Hulu

Tabel 6.7

Prioritas Nasional IV

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Program / Kegiatan Prioritas	Belanja			Output			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	93.708.000	93.696.350	99,99	1	1	Lembaga	100,00
QCD.U23 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	107.821.000	92.695.935	85,97	1	1	Perkara	100,00
QIA.001 Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT	86.126.000	86.116.145	99,99	133	133	Produk	100,00
QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	117.256.000	117.109.850	99,88	219	219	Produk	100,00
QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58.864.000	58.863.942	100,00	26	26	Lembaga	100,00
QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	168.074.000	168.051.282	99,99	141	141	Lembaga	100,00
QDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11.923.000	11.923.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00
QDB.002 Desa Pangan Aman	29.304.000	29.303.600	100,00	1	1	Lembaga	100,00
QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	6.695.000	6.695.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00
	679.771.000	664.455.104					

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>Capaian Output</i>	F.2.13. Capaian Output Selama periode 31 Desember 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu sebagai berikut: Tabel 49 <i>Laporan Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu</i> <i>Periode 31 Desember 2025</i> Kementerian/Lembaga : (063) BPOM Unit Organisasi : (01) BPOM Satuan Kerja : (690484) Balai POM di Indragiri Hulu Fungsi : (07) Sub Fungsi : (07.01) Program : DR.WA Lokasi : Indragiri Hulu
------------------------------	---

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	8.810.000	8.807.664	99,97	14	14	kegiatan	100,00
	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	53.671.000	53.670.091	100,00	11	11	dokumen	100,00
	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	29.113.000	29.113.000	100,00	95	95	Orang	100,00
	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	88.955.000	88.921.168	99,96	1	1	laporan	100,00
	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	9.615.000	9.614.528	100,00	22	22	kegiatan	100,00
	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	242.905.000	242.866.461	99,98	1	1	Unit	100,00
	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	139.846.000	139.846.000	100,00	11	11	Unit	100,00
	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	93.708.000	93.696.350	99,99	1	1	Lembaga	100,00
	QCD.U23	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB INDRAGIRI HULU	107.821.000	92.695.935	85,97	1	1	Perkara	100,00
	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	11.923.000	11.923.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00
	QDB.002	Desa Pangan Aman	29.304.000	29.303.600	100,00	1	1	Lembaga	100,00
	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	6.695.000	6.695.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00
	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	12.948.000	12.947.300	99,99	3	3	UMKM	100,00
	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	86.126.000	86.116.145	99,99	133	112	Produk	84,21
	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	117.256.000	117.109.850	99,88	219	219	Produk	100,00
	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58.864.000	58.863.942	100,00	26	26	Lembaga	100,00
	QIC003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	510.000	510.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00
	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	168.074.000	168.051.282	99,99	141	141	Lembaga	100,00
	EBA956	Layanan BMN	2.310.000	2.310.000	100,00	1	1	Layanan	100,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : BALAI POM DI INDRAGIRI HULU 690484

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:23 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	619,397	619,397	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	619,397	619,397	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	619,397	619,397	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	15,883,385,000	3,495,097,689	(12,388,287,311)	22	6,019,839,000	5,452,136,422	567,702,578	91
1. Belanja Pegawai	1,243,712,000	1,243,055,701	(656,299)	100	1,667,160,000	1,667,047,492	112,508	100
2. Belanja Barang	2,806,140,000	1,869,329,527	(936,810,473)	67	2,899,018,000	2,331,432,861	567,585,139	80
3. Belanja Modal	11,833,533,000	382,712,461	(11,450,820,539)	3	1,453,661,000	1,453,656,069	4,931	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : BALAI POM DI INDRAGIRI HULU 690484

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:23 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	15,883,385,000	3,495,097,689	(12,388,287,311)	22	6,019,839,000	5,452,136,422	567,702,578	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0900
SATUAN KERJA : 690484
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
RIAU
BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 10:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	551,683,000	753,629,000	753,627,800	0	753,627,800	100	1,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	17,000	16,038	420	15,618	91.87	1,382
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	40,430,000	42,148,000	42,145,832	0	42,145,832	99.99	2,168
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,080,000	9,222,000	9,220,730	0	9,220,730	99.99	1,270
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	12,420,000	12,420,000	370,000	12,050,000	97.02	370,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	41,625,000	51,990,000	51,990,000	0	51,990,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	0	2,698,000	2,697,565	0	2,697,565	99.98	435
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,949,000	40,338,000	40,337,940	0	40,337,940	100	60
511129	Belanja Uang Makan PNS	65,708,000	146,410,000	146,173,000	0	146,173,000	99.84	237,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24,885,000	20,465,000	20,465,000	0	20,465,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	779,980,000	1,079,337,000	1,079,093,905	370,420	1,078,723,485	99.94	613,515
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	75,578,000	107,480,000	107,478,800	0	107,478,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	4,000	1,468	0	1,468	36.7	2,532
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,362,000	7,466,000	7,465,280	0	7,465,280	99.99	720
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,812,000	898,000	897,008	0	897,008	99.89	992
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,165,000	9,450,000	9,450,000	0	9,450,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,736,000	5,287,000	5,286,660	0	5,286,660	99.99	340
511628	Belanja Uang Makan PPPK	6,000,000	17,663,000	17,626,000	0	17,626,000	99.79	37,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,035,000	1,295,000	1,295,000	0	1,295,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	108,695,000	149,543,000	149,500,216	0	149,500,216	99.97	42,784
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	9,788,000	12,436,000	12,436,000	0	12,436,000	100	0
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	900,000	2,396,000	2,396,000	0	2,396,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	10,688,000	14,832,000	14,832,000	0	14,832,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	899,363,000	1,243,712,000	1,243,426,121	370,420	1,243,055,701	99.95	656,299
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	66,000,000	141,463,000	117,561,366	0	117,561,366	83.1	23,901,634
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,280,000	16,356,000	10,450,552	0	10,450,552	63.89	5,905,448
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97,920,000	73,611,000	72,150,000	0	72,150,000	98.02	1,461,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,406,000	10,370,000	7,819,112	0	7,819,112	75.4	2,550,888

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0900
SATUAN KERJA : 690484
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
RIAU
BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 10:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	186,606,000	241,800,000	207,981,030	0	207,981,030	86.01	33,818,970
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	167,269,000	188,922,000	133,905,995	0	133,905,995	70.88	55,016,005
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,200,000	22,650,000	8,300,000	0	8,300,000	36.64	14,350,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,500,000	47,406,000	35,400,000	0	35,400,000	74.67	12,006,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	950,000	950,000	0	950,000	100	0
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	2,956,000	2,955,868	0	2,955,868	100	132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	197,969,000	262,884,000	181,511,863	0	181,511,863	69.05	81,372,137
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	172,763,000	195,683,000	85,621,168	0	85,621,168	43.76	110,061,832
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	172,763,000	195,683,000	85,621,168	0	85,621,168	43.76	110,061,832
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	78,000,000	51,150,000	51,149,970	0	51,149,970	100	30
522141	Belanja Sewa	303,625,000	285,540,000	281,810,000	0	281,810,000	98.69	3,730,000
522151	Belanja Jasa Profesi	32,700,000	30,151,000	9,500,000	0	9,500,000	31.51	20,651,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	348,700,000	393,783,000	354,287,788	0	354,287,788	89.97	39,495,212
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	763,025,000	760,624,000	696,747,758	0	696,747,758	91.6	63,876,242
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49,559,000	68,557,000	62,247,718	0	62,247,718	90.8	6,309,282
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	5,772,000	5,772,000	0	5,772,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	49,559,000	74,329,000	68,019,718	0	68,019,718	91.51	6,309,282
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	707,989,000	716,146,000	483,023,806	0	483,023,806	67.45	233,122,194
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114,319,000	119,910,000	97,550,600	0	97,550,600	81.35	22,359,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,495,000	24,293,000	6,340,000	0	6,340,000	26.1	17,953,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	498,969,000	410,471,000	42,533,584	0	42,533,584	10.36	367,937,416
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,353,772,000	1,270,820,000	629,447,990	0	629,447,990	49.53	641,372,010
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,723,694,000	2,806,140,000	1,869,329,527	0	1,869,329,527	66.62	936,810,473
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156,400,000	382,751,000	382,712,461	0	382,712,461	99.99	38,539
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,600,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	159,000,000	382,751,000	382,712,461	0	382,712,461	99.99	38,539

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0900 **RIAU**
SATUAN KERJA : 690484 **BALAI POM DI INDRAGIRI HULU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 10:24 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,680,543,000	11,450,782,000	0	0	0	0	11,450,782,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	11,680,543,000	11,450,782,000	0	0	0	0	11,450,782,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	11,839,543,000	11,833,533,000	382,712,461	0	382,712,461	3.23	11,450,820,539
	JUMLAH BELANJA	15,462,600,000	15,883,385,000	3,495,468,109	370,420	3,495,097,689	22	12,388,287,311

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:25 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	65,868,682	88,044,028	(22,175,346)	(25.19)
JUMLAH ASET LANCAR	65,868,682	88,044,028	(22,175,346)	(25.19)
ASET TETAP				
Tanah	1,246,580,000	1,246,580,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,749,830,432	2,367,117,971	382,712,461	16.17
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	300,503,751	(300,503,751)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,496,122,231)	(1,121,708,223)	(374,414,008)	33.38
JUMLAH ASET TETAP	2,500,288,201	2,792,493,499	(292,205,298)	(10.46)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	26,380,348	300,503,751	(274,123,403)	(91.22)
Aset Lain-lain	300,503,751	0	300,503,751	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	326,884,099	300,503,751	26,380,348	8.78
JUMLAH ASET	2,893,040,982	3,181,041,278	(288,000,296)	(9.05)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	26,380,348	304,715,210	(278,334,862)	(91.34)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,380,348	304,715,210	(278,334,862)	(91.34)
JUMLAH KEWAJIBAN	26,380,348	304,715,210	(278,334,862)	(91.34)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,866,660,634	2,876,326,068	(9,665,434)	(0.34)
JUMLAH EKUITAS	2,866,660,634	2,876,326,068	(9,665,434)	(0.34)
JUMLAH EKUITAS	2,866,660,634	2,876,326,068	(9,665,434)	(0.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,893,040,982	3,181,041,278	(288,000,296)	(9.05)

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	55,069,466	0
0.0	117114	Suku Cadang	8,481,250	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,317,966	0
0.0	131111	Tanah	1,246,580,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,749,830,432	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,496,122,231
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	26,380,348	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	300,503,751	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	26,380,348
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,495,097,689
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	619,397	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,152,182
0.0	391111	Ekuitas	0	2,876,326,068
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,873,885
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	3,050,000	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	159,881
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	459,516
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	753,627,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,618	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	42,145,832	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,220,730	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,050,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	51,990,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,697,565	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	40,337,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	146,173,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,465,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	107,478,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,468	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,465,280	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	897,008	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,450,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,286,660	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,626,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,295,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	12,436,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,396,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	116,934,216	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:26 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,450,552	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72,150,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,819,112	0
3.0	521211	Beban Bahan	133,905,995	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,300,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	35,400,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,905,868	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	47,565,661	0
3.0	522141	Beban Sewa	281,810,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	354,287,788	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62,247,718	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5,772,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	483,023,806	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,550,600	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,340,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,533,584	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	375,237,893	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	72,552,879	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,300,580	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	30,053,022	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	6,042,215	0
JUMLAH			7,900,571,800	7,900,571,800

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,495,097,689
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	619,397	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	159,881
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	459,516
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	753,627,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,038	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,145,832	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,220,730	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,420,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	51,990,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,697,565	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,337,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	146,173,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,465,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	107,478,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,468	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,465,280	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	897,008	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9,450,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,286,660	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	17,626,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,295,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	12,436,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,396,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	117,561,366	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,450,552	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,150,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,819,112	0
3.0	521211	Belanja Bahan	133,905,995	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,300,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,400,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	950,000	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	2,955,868	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,621,168	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	51,149,970	0
3.0	522141	Belanja Sewa	281,810,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,500,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	354,287,788	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62,247,718	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,772,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	483,023,806	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,550,600	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,340,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,533,584	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382,712,461	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	420
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	370,000
JUMLAH			3,496,087,506	3,496,087,506

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0900

SATUAN KERJA : 690484

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RIAU

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl. Cetak 06/05/2026 10:30 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	64,510,148	0
0.0	117114	Suku Cadang	7,710,830	0
0.0	117131	Bahan Baku	15,823,050	0
0.0	131111	Tanah	1,246,580,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,367,117,971	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	300,503,751	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,121,708,223
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	300,503,751	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	4,211,459
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	300,503,751
0.0	391111	Ekuitas	0	2,876,326,068
JUMLAH			4,302,749,501	4,302,749,501

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:30 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	159,881	0	159,881	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	159,881	0	159,881	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	159,881	0	159,881	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,243,055,701	1,667,047,492	(423,991,791)	(25.434)
Beban Persediaan	102,605,901	100,922,663	1,683,238	1.668
Beban Barang dan Jasa	1,082,029,192	1,167,198,164	(85,168,972)	(7.297)
Beban Pemeliharaan	69,320,298	65,893,856	3,426,442	5.2
Beban Perjalanan Dinas	629,447,990	982,476,462	(353,028,472)	(35.933)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:30 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	375,237,893	308,771,335	66,466,558	21.526
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,501,696,975	4,292,309,972	(790,612,997)	(18.419)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,501,537,094)	(4,292,309,972)	790,772,878	(18.423)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5,582,699)	0	(5,582,699)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	459,516	0	459,516	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,042,215	0	6,042,215	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5,582,699)	0	(5,582,699)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,507,119,793)	(4,292,309,972)	785,190,179	(18.293)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,507,119,793)	(4,292,309,972)	785,190,179	(18.293)

Keterangan :
FINAL



Pematang Reba, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
VERAMIKA GINTING
NIP 197605022002122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:31 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,876,326,068	1,713,663,239	1,162,662,829	67.85
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,507,119,793)	(4,292,309,972)	785,190,179	(18.29)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	823,885	0	823,885	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	823,885	0	823,885	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,496,630,474	5,454,972,801	(1,958,342,327)	(35.9)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(9,665,434)	1,162,662,829	(1,172,328,263)	(100.83)
EKUITAS AKHIR	2,866,660,634	2,876,326,068	(9,665,434)	(0.34)

Keterangan :

FINAL

Pematang Reba, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
★ **BADAN POM** ★
VERONIKA GINTING
NIP 197605022002122001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAKPB : 690484 BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl.Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 06/05/26 10:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	55,069,466
117114	Suku Cadang	8,481,250
117131	Bahan Baku	2,317,966
131111	Tanah	1,246,580,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,749,830,432
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,496,122,231)
166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	300,503,751
J U M L A H		2,866,660,634

Pematang Reba, 6 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 Yudi Mulya, S.Si., Apt., M.H
 197605022002122001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
UAKPB : 690484 **BALAI POM DI INDRAGIRI HULU**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:34 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		5,862	1,246,580,000	0	0	0	0	5,862	1,246,580,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	5,862	1,246,580,000	0	0	0	0	5,862	1,246,580,000
132111	Peralatan dan Mesin		244	2,367,117,971	71	393,444,161	8	10,731,700	307	2,749,830,432
3010111003	Mesin Penghancur Es	Unit	0	0	2	7,992,000	0	0	2	7,992,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	22,354,000	0	0	0	0	1	22,354,000
3020105018	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Unit	1	535,000,000	0	0	0	0	1	535,000,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	1	3,233,500	0	0	0	0	1	3,233,500
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	8,478,000	0	0	0	0	1	8,478,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	34,165,355	2	9,879,000	0	0	13	44,044,355
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	1	1,900,000	0	0	1	1,900,000
3050104003	Rak Besi	Buah	5	32,518,980	2	6,345,480	0	0	7	38,864,460
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	13	35,006,900	0	0	0	0	13	35,006,900
3050104007	Brandkas	Buah	1	13,999,000	0	0	0	0	1	13,999,000
3050104015	Locker	Buah	1	4,395,300	2	8,821,440	0	0	3	13,216,740
3050104020	Lemari Display	Buah	1	7,800,000	0	0	0	0	1	7,800,000
3050104022	Folding Container Box	Buah	1	2,554,000	0	0	0	0	1	2,554,000
3050104024	Laci Box	Buah	0	0	10	28,649,995	0	0	10	28,649,995
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	2	4,623,150	0	0	2	4,623,150
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	9,106,875	1	37,649,200	7	7,998,750	2	38,757,325
3050105010	White Board	Buah	1	1,418,000	0	0	0	0	1	1,418,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	8,945,818	0	0	0	0	2	8,945,818
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,527,500	0	0	0	0	1	5,527,500
3050105095	Wastafel Portable	unit	0	0	3	4,284,600	0	0	3	4,284,600
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	11	19,274,000	9	24,345,000	0	0	20	43,619,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	13	42,900,000	9	29,349,801	0	0	22	72,249,801
3050201005	Sice	Buah	2	35,351,000	1	14,999,999	0	0	3	50,350,999
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	23,778,040	0	0	0	0	2	23,778,040
3050201009	Meja Komputer	Buah	15	62,173,500	0	0	0	0	15	62,173,500
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	17,520,000	0	0	0	0	1	17,520,000
3050201022	Partisi	Buah	1	54,315,000	1	7,992,000	0	0	2	62,307,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	2	72,430,000	0	0	0	0	2	72,430,000
3050201033	Sofa	set	0	0	1	3,099,000	0	0	1	3,099,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	2	5,999,998	0	0	2	5,999,998
3050203004	Mesin Cuci	Buah	2	8,173,000	0	0	0	0	2	8,173,000
3050204001	Lemari Es	Buah	2	12,160,000	1	1,940,000	0	0	3	14,100,000
3050204004	A.C. Split	Buah	9	71,098,500	1	4,749,999	0	0	10	75,848,499
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	17,000,000	1	13,000,000	0	0	2	30,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UAKPB : 690484 BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:34 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	2	8,340,000	0	0	0	0	2	8,340,000
3050205029	Microwave	Buah	1	2,600,000	0	0	0	0	1	2,600,000
3050206002	Televisi	Buah	4	26,777,000	0	0	0	0	4	26,777,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	6,710,000	1	3,500,000	0	0	2	10,210,000
3050206020	Camera Video	Buah	1	8,400,000	0	0	0	0	1	8,400,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2,147,419	1	1,399,999	0	0	2	3,547,418
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	5,058,900	0	0	0	0	1	5,058,900
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	3,528,000	1	2,386,500	0	0	2	5,914,500
3050207002	Dehumidifier	Buah	0	0	3	15,760,000	0	0	3	15,760,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	2,382,269	0	0	0	0	1	2,382,269
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	4,180,000	0	0	0	0	1	4,180,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	10,206,000	0	0	0	0	2	10,206,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	0	0	1	4,440,000	0	0	1	4,440,000
3060101092	Analog/Digital Receiver	Buah	1	2,732,950	0	0	1	2,732,950	0	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	3,952,703	0	0	0	0	1	3,952,703
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	13,174,662	0	0	0	0	1	13,174,662
3060102128	Camera Digital	Buah	4	44,181,750	0	0	0	0	4	44,181,750
3060102165	Camera Conference	Buah	1	3,820,000	0	0	0	0	1	3,820,000
3060102167	Drone	Buah	1	45,000,510	0	0	0	0	1	45,000,510
3060105037	Teropong/Keker	Buah	1	24,950,000	0	0	0	0	1	24,950,000
3060201004	Telephone Mobile	Buah	2	21,719,820	0	0	0	0	2	21,719,820
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	3,151,000	0	0	0	0	1	3,151,000
3060207017	Handphone Encription	Buah	1	1,799,000	0	0	0	0	1	1,799,000
3060322001	Dehumidifier (Humidity Control)	Buah	1	3,209,000	0	0	0	0	1	3,209,000
3060347002	Genset	Buah	1	69,986,000	0	0	0	0	1	69,986,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	26	40,302,000	0	0	0	0	26	40,302,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	10	14,275,200	0	0	0	0	10	14,275,200
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	0	0	1	1,500,000	0	0	1	1,500,000
3080112073	Micro Pippettes	Buah	2	14,706,000	0	0	0	0	2	14,706,000
3080113019	Desicator	Buah	1	22,390,000	0	0	0	0	1	22,390,000
3080113025	U.V. Lamp (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	3,900,000	0	0	0	0	1	3,900,000
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000
3080117016	Lemari Asam	Buah	1	155,400,000	0	0	0	0	1	155,400,000
3080119001	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
3080141281	Tlc Scanner	Buah	1	12,265,000	0	0	0	0	1	12,265,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
UAKPB : 690484 **BALAI POM DI INDRAGIRI HULU**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:34 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3090407005	Lemari Camera	Buah	2	7,837,720	0	0	0	0	2	7,837,720
3090407022	Layar Proyektor	Buah	1	2,145,000	0	0	0	0	1	2,145,000
3090407035	Finger Print Camera	Buah	1	4,801,500	0	0	0	0	1	4,801,500
3100102001	P.C Unit	Buah	8	116,212,400	0	0	0	0	8	116,212,400
3100102002	Lap Top	Buah	16	266,669,300	7	101,500,000	0	0	23	368,169,300
3100102003	Note Book	Buah	3	43,572,000	0	0	0	0	3	43,572,000
3100102009	Tablet PC	Buah	1	18,950,000	0	0	0	0	1	18,950,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	59,380,600	2	9,546,000	0	0	16	68,926,600
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	39,700,000	2	28,800,000	0	0	7	68,500,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4,000,000	0	0	0	0	2	4,000,000
3150302005	Tenda	Buah	0	0	1	8,991,000	0	0	1	8,991,000
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	2	9,475,500	0	0	0	0	2	9,475,500
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	1	3,052,500	0	0	0	0	1	3,052,500
TOTAL				3,613,697,971		393,444,161		10,731,700		3,996,410,432





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
KPPN RENGAT

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 690484 - BALAI POM DI INDRAGIRI HULU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 10:35

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	15,883,385,000	15,883,385,000	0
2	Belanja	3,495,468,109	3,495,468,109	0
3	Pengembalian Belanja	-370,420	-370,420	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	619,397	619,397	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-063.01.2.690484/2025

Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (09.05) RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR KPPN : (092) Rengat

Satuan Kerja : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00176/DRPP/690484/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	30.000.000,00	332.042.125,00	362.042.125,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	30.000.000,00	332.042.125,00	362.042.125,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	30.000.000,00	168.058.491,00	198.058.491,00	0,00
	1. BP UP*)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	163.983.634,00	163.983.634,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	4.074.857,00	4.074.857,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



SUCI PUSFA SARI

NIP 199602062019032003

KAB. INDRAGIRI HILIR, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran

PRATIWI

NIP 199510052019032005

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNAUDITED TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (690484) BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

Kode dan Nama UAPPAW : (432829) BBPOM DI PEKANBARU

Kode dan Nama Eselon 1 : (063) BADAN POM RI

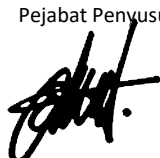
Kode dan Nama K/L : (01) BADAN POM RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CALK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya

8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Pratiwi, A.Md) NIP. 199510052019032005		Pematang Reba, 31 Desember 2025 Penelaah,  (Debora Janet Sibarani, S.E) NIP. 19960426 201903 2 001		